

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Trussmedia Grafika.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Munawir S. 1980. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ronny Hanitiyo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, cet. 6. Jakarta: Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zakiyah. 2015. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

### **Jurnal**

Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. 2021. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 3.

Hafif Maulana. 2021. "Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra dan Dewa Gde Rudy. 2022. "Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, Nomor 10.

Permatasari Rika, F. Yudhi Priyo Amoro, dan Nurlaily. 2022. "Efektivitas Penerapan Transaksi QRIS Era Covid-19 di Pasar Tradisional Kota Batam Menurut Perspektif Hukum Progresif", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4, Nomor 2.

### **Skripsi**

Refky Maulana Putra, Skripsi: "Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dengan Menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" (Padang: Universitas Andalas, 2020).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], oleh Tim Redaksi BIP, 2017, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari Kota Padang

**Website**

OCBC NISP. Retribusi: pengertian, contoh, dan bedanya dari pajak daerah. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 dari <https://www.ocbcnisp.com>.

Bank Indonesia. *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 dari <https://www.bi.go.id/QRIS/>.

